



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TONDANO

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK -, umur 59 tahun, tempat dan tanggal lahir Tanawangko, 02 Oktober 1965, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, dengan domisili elektronik pada alamat email: - sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK -, umur 46 tahun, tempat dan tanggal lahir Sonder, 25 Mei 1978, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di - Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, dengan domisili elektronik pada alamat email: - sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang tua calon suami Anak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal 19 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tondano secara elektronik melalui Aplikasi e-Court pada tanggal 20 November 2024 dengan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tdo, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak perempuan para Pemohon yang bernama :

- **ANAK**, tempat tanggal lahir Tambala, 30 November 2008, berumur 16 (enam belas) tahun, alamat di Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara bahwa calon mempelai wanita saat ini sudah tidak bersekolah, dan hanya menyelesaikan Pendidikan sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak bekerja;

2. Bahwa calon mempelai pria yang bernama :

- **CALON SUAMI**, tempat tanggal Lahir Mataindo, 5 September 1999, berumur 25 (dua puluh lima) tahun, alamat di Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, Bahwa calon mempelai pria telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Nelayan, dengan penghasilan per bulan kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3. Bahwa calon mempelai pria merupakan anak dari **CALON BESAN LK** tempat dan tanggal lahir Linawan, 12 Desember 1970, NIK -, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat di Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;

4. Bahwa calon mempelai pria merupakan anak dari **CALON BESAN PR** tempat dan tanggal lahir Linawan, 22 Juli 1972, NIK -, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, alamat di - Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;

5. Bahwa para calon mempelai telah menjalin hubungan asmara kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan saat ini anak para Pemohon dalam keadaan tidak hamil berdasarkan Surat Keterangan Berbadan Sehat dari UPT Puskesmas Tanawangko, dan hubungan tersebut sudah diketahui oleh

Halaman 2 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tdo



para Pemohon berserta pihak keluarga calon mempelai wanita dan calon mempelai pria;

6. Bahwa calon mempelai wanita **ANAK** telah menyelesaikan pendidikan terakhir di Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Negeri 1 Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;

7. Bahwa Pemohon beserta pihak keluarga telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan antara **ANAK** dengan **CALON SUAMI** di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, namun oleh Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombariri mengeluarkan Surat Penolakan Perkawinan sebagai berikut :

- Surat penolakan atas nama **ANAK** yaitu calon mempelai wanita (berumur 16 tahun) dengan nomor surat: B.109/Kua.23.13.01/HK.00/11/2024;

dan menyarankan untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah melalui Pengadilan Agama Tondano dikarenakan calon mempelai wanita masih dibawah umur untuk menikah (belum mencapai usia 19 tahun);

8. Bahwa Permohonan ini diajukan demi kebaikan kedua calon mempelai yaitu **ANAK** dan **CALON SUAMI** kelak, dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat dekat;

9. Bahwa dari kedua pihak keluarga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak keberatan dengan rencana pelaksanaan pernikahan antara kedua anak tersebut;

10. Bahwa antara calon mempelai yaitu **ANAK** dan **CALON SUAMI** tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

11. Bahwa dari kedua pihak keluarga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah siap membimbing serta ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita;

12. Bahwa para Pemohon berharap agar dapat segera menikahkan kedua anak tersebut, namun terhambat menyangkut usia yang masih belum

Halaman 3 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai usia untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tondano *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari para Pemohon yaitu calon mempelai wanita yang bernama **ANAK** yang berumur 16 tahun dengan calon mempelai pria **CALON SUAMI** yang berumur 25 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dengan menghadirkan pula Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawinnya, Calon suami Anak Pemohon serta Orang tua calon suami Anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, untuk memastikan orang tua, anak, calon mempelai serta orang tua mempelai laki-laki memahami risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Halaman 4 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai wanita yakni Anak Pemohon yang bernama **ANAK**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Anak Pemohon adalah gadis yang berusia 16 tahun;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun Anak Pemohon telah menjalin hubungan percintaan dengan lelaki bernama **CALON SUAMI**;
- Bahwa Anak Pemohon dengan **CALON SUAMI** sering bertemu dan merasa cocok;
- Bahwa Anak Pemohon ingin segera menikah karena hubungannya dengan **CALON SUAMI** sudah sangat erat;
- Bahwa Anak Pemohon dan **CALON SUAMI** telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan Anak Pemohon dengan **CALON SUAMI**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa keluarga **CALON SUAMI** telah merestui hubungan keduanya;
- Bahwa Anak Pemohon dengan **CALON SUAMI** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Anak Pemohon beragama Islam;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon berstatus jejaka dan siap bertanggung jawab sebagai suami;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami Anak Pemohon yang telah menjalin hubungan dekat dengan Anak Pemohon yang bernama **ANAK** sejak 2 (dua) tahun dan telah siap menikah dengan Anak Pemohon;
- Bahwa hubungannya dengan **ANAK** sangat dekat;
- Bahwa ia dan **ANAK** telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Halaman 5 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahannya dengan **ANAK**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa keluarganya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa antara calon suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia telah beragama Islam;
- Bahwa ia sudah melamar **ANAK** dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa status calon suami Anak Pemohon adalah jejaka berusia 25 tahun 2 bulan 24 hari dan dirinya telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan per bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama **CALON BESAN LK**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah ayah kandung calon suami Anak Pemohon
- Bahwa anaknya telah menjalin hubungan dekat dengan Anak Pemohon yang bernama **ANAK** sejak 2 (dua) tahun dan ingin segera menikahkan anaknya dengan Anak Pemohon;
- Bahwa hubungan anaknya dengan **ANAK** sangat dekat;
- Bahwa keluarga besarnya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa antara anaknya dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anaknya telah beragama Islam;
- Bahwa ia sudah melamar **ANAK** dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;

Halaman 6 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anaknya (calon suami Anak Pemohon) adalah jejak yang telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa pihaknya merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;
- Bahwa ia khawatir anaknya akan terus berbuat dosa apabila tidak segera menikah dengan calon istrinya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I** (Pemohon I), NIK: - tertanggal 11 April 2013 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON II**, NIK: - tertanggal 19 Juli 2012 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON I**, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Minahasa Nomor: - Tanggal 17 Juni 2009 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **CALON SUAMI**, NIK: - tertanggal 02 Mei 2023 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **CALON BESAN LK**, NIK: - tertanggal 20 Juni 2023 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **CALON BESAN PR**, NIK: - tertanggal 20 Juni 2023 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **CALON BESAN LK**, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten

Halaman 7 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Mongondow Selatan Nomor: - Tanggal 18 Januari 2024 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK** (Anak Pemohon) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Minahasa Nomor: - Tanggal 05 Maret 2012 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **CALON SUAMI** dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor: - Tanggal 06 September 2016, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.9;

10. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B atas nama **ANAK** dari Kepala -, tertanggal 18 Juni 2024 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.10;

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Budi Mulia Adow atas nama **CALON SUAMI** dari Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Budi Mulia Adow, tertanggal 10 Mei 2019 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.11;

12. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama **ANAK** dari Puskesmas Tanawangko, Nomor: - Tanggal 11 November 2024 bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.12;

13. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah kepada wali **ANAK** dari KUA Tombariri, Kabupaten Minahasa, nomor - tertanggal **12 November 2024**, bermeterai cukup serta telah di-nazegelen, diberi kode P.13;

14.-----

Saksi:

15. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di - Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Anak Pemohon karena saksi Paman Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya **ANAK** dengan keponakan saksi yang bernama **CALON SUAMI**, namun

Halaman 8 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;

- Bahwa saksi melihat antara Anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta sejak 2 (dua) tahun, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **ANAK** dengan **CALON SUAMI**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status Anak Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suami adalah jejaka;
- Bahwa saksi melihat Anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;
- Bahwa **CALON SUAMI** bekerja sebagai nelayan dan tukang ojek;

16. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di - Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Anak Pemohon karena saksi adalah teman dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya **ANAK** dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**, namun Anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara Anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta sejak 2 (dua) tahun, antara keduanya sangat dekat;

Halaman 9 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tdo



- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **ANAK** dengan **CALON SUAMI**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status Anak Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suami adalah jejaka;
- Bahwa saksi melihat Anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;
- Bahwa **CALON SUAMI** telah bekerja sebagai tukang ojek;

17. SAKSI 3, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di - Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Anak Pemohon karena saksi adalah tante anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya **ANAK** dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**, namun Anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara Anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta sejak 2 (dua) tahun, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami sudah merestui dan siap membimbing;

Halaman 10 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tdo



- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **ANAK** dengan **CALON SUAMI**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status Anak Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suami adalah jejaka;
- Bahwa saksi melihat Anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;
- Bahwa **CALON SUAMI** telah bekerja sebagai nelayan dan tukang ojek;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apa pun lagi kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tondano, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tondano berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Halaman 11 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tondano memberikan Dispensasi Kawin bagi anak perempuannya yang bernama **ANAK**, usia 16 tahun, atas alasan yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa Anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan dengan **CALON SUAMI**. Sekarang hubungan keduanya sudah sangat erat dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keduanya pada KUA Tombariri, Kabupaten Minahasa, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Pemohon belum cukup umur, padahal Anak Pemohon telah akil balig serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga dan calon suami Anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga, saat ini ia telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan per bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Anak Pemohon, calon suami Anak Pemohon, dan orang tua calon suami Anak Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon telah terjalin hubungan percintaan sejak 2 (dua) tahun dan saat ini keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan, karenanya mereka berencana akan menikah, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali masalah umur Anak Pemohon, Anak Pemohon sudah siap dan setuju menjadi istri dan ibu rumah tangga bagi calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI** yang memiliki perbedaan usia 9 tahun 2 bulan 25 hari, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab. Kedua orang tua calon mempelai pun merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;

Halaman 12 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *actori incumbit probatio* yang terkandung dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara yaitu barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.13 serta 3 (tiga) orang saksi yakni **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** serta **SAKSI 3**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon berupa fotokopi cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P.1 sampai dengan P.13 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I** (Pemohon I), adalah akta autentik yang menjelaskan identitas Pemohon, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa identitas Pemohon I telah sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON II** adalah akta autentik yang menjelaskan identitas Pemohon II, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa identitas Pemohon II telah sesuai;

Halaman 13 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON I** (Pemohon I), adalah akta autentik yang menjelaskan tempat tinggal Pemohon yang secara formal dan faktual bersama dengan istri dan anaknya yang bernama **ANAK**, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tondano sehingga perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tondano;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **CALON SUAMI** adalah akta autentik yang menjelaskan identitas calon suami Anak Pemohon, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal calon suami Anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa identitas calon suami Anak Pemohon telah sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **CALON BESAN LK** adalah akta autentik yang menjelaskan identitas ayah calon suami Anak Pemohon, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal ayah calon suami Anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa identitas ayah calon suami Anak Pemohon telah sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **CALON BESAN PR** adalah akta autentik yang menjelaskan identitas ibu calon suami Anak Pemohon, yakni: nama, NIK, agama, status,

Halaman 14 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal ibu calon suami Anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPPerdata, maka terbukti bahwa identitas ibu calon suami Anak Pemohon telah sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **CALON BESAN LK**, adalah akta autentik yang menjelaskan tempat tinggal keluarga calon suami anak Pemohon, bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPPerdata, maka terbukti bahwa tempat tinggal keluarga calon suami anak Pemohon telah sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **ANAK**, adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa **ANAK** lahir di Tambala pada tanggal 30 November 2008 adalah anak kandung dari **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPPerdata, maka terbukti bahwa **ANAK** saat ini masih berusia 16 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan Pemohon selaku orang tua sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **CALON SUAMI**, adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa **CALON SUAMI** lahir di Mataindo pada tanggal 5 September 1999 adalah anak kandung dari **CALON BESAN LK** dan **CALON BESAN PR** sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh

Halaman 15 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, maka terbukti bahwa **CALON SUAMI** saat ini telah berusia 25 tahun 2 bulan 24 hari;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B atas nama **ANAK** dari Kepala SPNF SKB Tombariri, adalah akta autentik yang menjelaskan bahwa **ANAK** telah lulus jenjang pendidikan Kesetaraan Program Paket B sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, maka terbukti bahwa **ANAK** telah lulus jenjang Pendidikan Kesetaraan Program Paket B;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Budi Mulia Adow atas nama **CALON SUAMI** dari Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Budi Mulia Adow, adalah akta autentik yang menjelaskan bahwa **CALON SUAMI** telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, maka terbukti bahwa **CALON SUAMI** telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama **ANAK** dari Puskesmas Tanawangko adalah akta sepihak atau pengakuan sepihak isinya yang menjelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan, anak yang bernama **ANAK** dalam keadaan sehat, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, dan sesuai Pasal 296 RBg hakim berpendapat, alat bukti tersebut hanyalah sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah kepada wali **ANAK** dari KUA Tombariri, Kabupaten Minahasa, adalah akta autentik yang menjelaskan permohonan pendaftaran perkawinan **ANAK**

Halaman 16 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **CALON SUAMI** ditolak karena calon mempelai wanita belum cukup umur (belum genap 19 tahun), sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombariri menolak permohonan pendaftaran perkawinan **ANAK** dengan **CALON SUAMI** karena calon mempelai wanita belum cukup umur, oleh karenanya dengan bersandar pada asas *poin't de Interes poin't de action*, Pemohon selaku walinya mempunyai kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan permohonan sesuai pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) serta saksi 3 (**SAKSI 3**) yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan antara Anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan, hubungannya saat ini sangat dekat dan Anak Pemohon telah cocok dan berkeinginan untuk segera menikah. Rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya, tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional didalamnya. Antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, status Anak Pemohon gadis, sedangkan status calon suami adalah jejaka, Anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga yang ditunjukkan dengan terbiasa membantu ibunya di rumah, keterangan tersebut, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para

Halaman 17 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 yang diajukan Pemohon bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, maka keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij*) sesuai Pasal 1908 KUHPerdata;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti fakta sebagai berikut:

- 1 Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tondano;
- 2 **ANAK** lahir di Tambala pada tanggal 30 November 2008 adalah anak kandung kesatu dari **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** yang berarti saat ini masih berusia 16 tahun;
- 3 ANAK telah lulus jenjang pendidikan kesetaraan program paket B;
- 4 Calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI**, saat ini berusia 25 tahun 2 bulan 24 hari;
- 5 Status Anak Pemohon saat ini adalah gadis dan tidak terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain, sedangkan calon suami jejaka;
- 6 Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, ataupun sesusuan dan tidak ada larangan menurut agama maupun undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan, kecuali masalah umur;
- 7 Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk menikah tanpa ada paksaan;
- 8 Pemohon dan Orang Tua Calon suami anak Pemohon merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;

Halaman 18 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tdo



9 Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon ingin segera melangsungkan pernikahan karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan saat ini keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan, karenanya pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan;

10 Secara fisik, mental, dan finansial keduanya mampu dan siap untuk melangsungkan pernikahan;

11 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombariri menolak permohonan pendaftaran perkawinan **ANAK** dengan **CALON SUAMI** karena calon mempelai wanita belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat dikonstatir fakta hukum bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombariri menolak permohonan pendaftaran perkawinan **ANAK** dengan **CALON SUAMI** karena saat ini calon mempelai wanita belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan namun keadaan sangat mendesak untuk ia segera melangsungkan pernikahan karena keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, akan diterapkan hukumnya (*dikonstitusir*) dengan pertimbangan (kualifisir) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan ini mencakup seluruh petitum dalam permohonan, maka akan Hakim akan pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum Permohonan Pemohon;

Pertimbangan Petitum Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan pemohon, hakim akan pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 28 B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sehingga perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), untuk membentuk keluarga atau rumah

Halaman 19 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, Anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu juz IX halaman 25 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, berbunyi sebagai berikut:

يكون الزواج فرضاً إذا تيقن الإنسان الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة، وحقوق الزواج الشرعية.

Artinya : Pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan jikalau tidak menikah, dan ia mampu untuk nafkahi istrinya berupa mahar dan nafkah serta hak-hak pernikahan lainnya;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon yang sudah lama dekat dan saling mencintai, bahkan keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan, sehingga keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga. Bila pernikahan keduanya tidak segera dilaksanakan, berpotensi menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari, maka demi kemaslahatan serta perlindungan dan kepentingan terbaik bagi keduanya, keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi: **الصَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ**, yakni kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang, dengan mengambil pendapat Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka (ulama tafsir) dalam kitabnya Tafsir Al-

Halaman 20 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA. Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azhar halaman 4933, dalam menafsirkan surah An-Nur ayat 32: jikalau pintu zina ditutup rapat, pintu kawin hendaklah dibuka, sehingga memberi dispensasi kepada Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, didahulukan dari pada menolaknya dengan alasan Anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, hal ini selaras pula dengan kaidah fikih, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai, serta calon suami Anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang cukup, dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara yang halal, sehingga rencana pernikahan tersebut telah pula mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak telah yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, oleh karenanya hakim juga mendasarkan pada kaidah fikih yang berbunyi: تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَثُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ, yakni kebijakan pemerintah atas rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa hakim juga perlu mengetengahkan Pasal 5 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak yang menyatakan *keluarga berkewajiban untuk memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah* serta pendapat Jamal Abdurrahman (ulama humaniora) sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Athfalul Muslimin: Kaifa rabbahumun nabiyyul amin* halaman 178 yang selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum, berbunyi sebagai berikut:

**اما البالغون يريدون الزواج فلا بد من تعريفهم
على أمور قبل الزواج لاغنى عن معرفتها،**

Halaman 21 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tdo



كأحكام البناء ومعاشرة الزوجية ولقاء الزوجين خاصة أول مرة، وذلك من الواجب.

Artinya : Bagi seorang balig yang ingin menikah, harus memahami hal-hal pranikah. Pengetahuan ini sangat dibutuhkan, seperti hukum-hukum keluarga, pergaulan suami-istri, pertemuan pasangan terutama saat pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Petitem Kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitem Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka terhadap petitem ketiga permohonan Pemohon, Hakim akan pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya, petitem ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitem Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitem Kesatu Permohonan ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan juga mempedomani peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 22 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tdo



2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK** untuk menikah dengan seorang lelaki bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1446 Hijriah, oleh Alfian Muhammady, S.Sy., sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Tondano yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tondano Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tdo tanggal 20 November 2024. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Tondano pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andi Tjandra Mokolintad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Panitera Pengganti,
ttd
Andi Tjandra Mokolintad, S.H.
Perincian biaya :

Hakim,
ttd
Alfian Muhammady, S.Sy.

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Sumpah	Rp75.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp245.000,00
(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)	